

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Kontestasi politik dalam konteks bencana mengalami dinamika yang begitu kuat, isu penanganan bencana tidak hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa tunggal, namun berkorelasi dengan peristiwa politik. Kajian politik pemilu dan bencana secara teoritis menunjukkan bahwa situasi bencana dapat menentukan kemenangan atau kekalahan petahana bergantung pada kemampuan para kandidat dalam merespons situasi bencana. Bencana alam dapat menjadi peristiwa politik yang dapat memperkuat atau memperlemah kekayaan elektoral para kandidat. *Retrospektive Multiplication effect Theory*”, menjelaskan fenomena kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara merupakan bentuk kegagalan secara struktural dan operasional terkait dengan capaian penanganan bencana. Dimensi inilah yang kemudian dikonseptualisasikan sebagai “Retrospektive Multiplication effect Theory” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) terhadap tata kelola penanganan bencana di KLU.

Penelitian ini membuktikan bahwa para kandidat menggunakan isu penanganan bencana sebagai modal utama dalam kampanye mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat integrasi faktual antara *Misattributed Blink Retrospection* dan *Negative Mindful Retrospection* dalam kasus tumbangnya petahana NADI pada Pilkada Lombok Utara 2020. Kekalahan petahana NADI tidak dapat dikotomi pada satu kendala secara terpisah melainkan harus diletakan pada satu kesatuan yang saling berdampingan. Kegagalan sistemik struktural nasional

menjadi pemicu gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja operasional birokrasi pada akar rumput di bawah.

Kekalahan petahana pada kontestasi politik Lombok utara 2020 membuktikan bahwa bencana alam dapat merusak kekayaan elektoral petahana. Kekalahan petahana menunjukkan bahwa isu penanganan bencana menjadi faktor utama yang dominan suara petahana mengalami penurunan yang signifikan. Kegagalan sistemik struktural memicu gelombang kekecewaan publik yang diperparah dengan kegagalan operasional pada akar rumput sehingga mendorong terjadinya *local proxy attribution* dimana publik tidak melakukan pemisahan kewenangan teknokratis maupun administrasi pemerintah pusat dan daerah. Penderitaan dan rasa trauma yang berkepanjangan direspon dengan memberikan penghukuman (*blink punishment*) pada petahana atas kompleksitas penderitaan yang dirasakan dibebankan kepada petahana daerah yang dianggap sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Masyarakat tidak memahami secara asimetris kekuasaan antara pusat dan daerah tetapi beban kesalahan diatribusikan kepada kepala daerah atas mandeknya kebijakan yang sesungguhnya bersifat setralistik.

Selain itu, kekalahan petahana NADI membuktikan bahwa persepsi harapan yang tidak terpenuhi berkaitan dengan penanganan bencana menjadi isu strategis pada Pilkada Lombok Utara. Proses penanganan perumahan dan bantuan sosial jaminan hidup bagi masyarakat korban bencana tidak sesuai dengan harapan publik mengakibatkan tergerusnya dukungan politik petahana. Berbagai daya upaya yang dilakukan oleh petahana untuk meyakinkan publik bahwa proses dan progres penanganan bencana di Lombok Utara sudah menunjukkan keberhasilan dengan

menyajikan data kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak lantas mengubah persepsi masyarakat terhadap kegagalan petahana dalam menyelesaikan persoalan perumahan dan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.

Fenomena kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara merupakan penguatan teoritis “*Retrospektive Multiplication effect Theory*, bencana sebagai peristiwa politik yang menghasilkan beberapa kebaruan, yaitu:

- (1) Menghasilkan proses Desaklarisasi fenomena yang bergerak menuju politisasi eksistensial yaitu pergeseran dari bencana alam ke kebijakan publik dan isu elektoral.
- (2) Menghasilkan model perilaku pemilih yang tertintegrasi (*Integrated Model*) atau pendekatan multidimensional, bahwa keputusan politik tunduk pada irisan antara keterbatasan struktural pemerintah pusat dan operasional birokrasi pemerintah daerah yang tidak maksimal.
- (3) Terjadinya dekonstruksi tata kelola bencana yang berbasis pada *diskonveksitas asimetri* dan *expentancy-disconfirmation* yang terbabaikan sehingga membentuk persepsi kegagalan dan harapan harapan yang tidak terpenuhi dalam manajemen bencana.
- (4) Keruntuhan pada pengelompokan sosial masyarakat dan struktur kekuasaan dinasti lokal yang bersifat sementara dan hanya bersifat jangka pendek sebagai wujud amuk elektoral.
- (5) Munculnya *political Nexus*: bencana sebagai sebuah peristiwa politik yang saling berkelindan dengan peristiwa lainnya.
- (6) Munculnya eksplanasi komprehensif pada incumbent *vulnerability* (kerentanan petahana) berdasarkan pada integrasi struktural dan operasional

dan soliditas internal tim pemenangan yang terfragmentasi secara kumulatif.

Tumbangnya petahana NADI pada perhelatan kontestasi politik di Lombok Utara, merupakan anatomi dekonstruksi kekuasaan yang bersifat struktural dan agensi yang saling menguatkan. Dialektika struktural berapada pada kewenangan pemerintah pusat sejatinya diluar kedali pemerintah daerah. Struktur anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana masih minim dan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pasca bencana alam gempa bumi di Lombok Utara. Proses birokrasi, verifikasi data dan anggaran berjenjang (*Time-Lag Fiscal*), membutuhkan koordinasi berlapis tiga Kementerian, terjadinya pemblokiran dana stimulan pembangunan rumah dan bantuan jaminan sosial bagi korban bencana gempa. Pola penyaluran bantuan secara bertahap (*Trance System*) yang kaku menyebabkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah bagi korban yang belum mendapatkan bantuan, serta bantuan yang terdistribusi tidak sesuai dengan harapan publik dalam bentuk dana langsung 50 juta tidak dalam bentuk Pokmas.

Selain faktor struktural, kekalahan petahana juga berasal dari faktor agensi petahan sendiri, yaitu (1) sebagai calon petahana tentunya memiliki kepercayaan tinggi (*over confident*) melihat hasil survei yang menunjukkan suara petahana unggul dibandingkan dengan calon yang lain. Kondisi tersebut membuat tim tidak maksimal dalam melakukan counter terhadap serangan lawan, sementara pasangan calon penantang semakin membangun isu kegagalan petahana dalam menyelesaikan persoalan perumahan dan bantuan sosial secara masif. (2) Beralihnya dukungan para simpatisan paslon petahana NADI kepada calon lain

dikarenakan tidak ada kepastian bantuan yang diberikan pemerintah ditengah kondisi mereka yang serba kekurangan. (3) Munculnya perpecahan dalam internal tim Najmul-Suardi disebabkan karena masuknya tim yang dianggap tidak berjuang dari awal. (4) Tidak adanya tim khusus untuk mengkonter serangan pasangan calon lawan terhadap isu penanganan bencana dan fitnah-fitnah politik. (5) Lemahnya strategi politik pasangan calon NADI dalam merespons serangan lawan secara khusus yang berkaitan dengan isu penanganan bencana perumahan dan bantuan sosial yang belum terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat korban bencana di Lombok Utara. (6) munculnya sengketa data perumahan, (7) keterbatasan fasilitator lapangan, (8) kurangnya pengawasan fasilitator terlatih, (9) Adanya oknum penyedia barang yang tidak menyelesaikan pekerjaan secara tuntas.

8.2 Implikasi Teoritis dan Empiris

1. Penelitian ini memperkaya literatur bagaimana korelasi bencana dan pemilu khususnya dalam menjelaskan bencana alam di sebagai sebuah peristiwa politik yang dapat memperkuat atau memperlemah kekayaan elektoral kandidat.
2. Sangat penting untuk mengamplifikasi penelitian ini supaya dapat direplikasi dan adaptasi oleh berbagai daerah di Indonesia, sehingga temuan yang di hasilkan tidak hanya terbatas pada konteks dan terbatas pada lokasi studi.
3. Melihat pola bagaimana bencana dan pemilu dapat menyebabkan kekalahan atau kemenangan kandidat pada kontestasi di daerah bencana.

8.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian yang telah dilakukan memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran isu bencana terhadap kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara 2020, namun demikian terdapat beberapa keterbatasan penelitian di antaranya:

- (1) Secara metodologis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jumlah responden yang terbatas, menyebabkan temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara statistik, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan mixed-methods dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan;
- (2) Selain itu, studi di masa akan datang dapat memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan petahana dari sisi internal pasangan NADI
- (3) Studi ini berfokus pada dampak bencana alam gempa bumi terhadap kekalahan petahana, belum menyentuh bencana non- alam pandemi secara lebih mendalam;
- (4) Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi peran media sosial sebagai ruang kontestasi kekuasaan yang pada saat itu tahapan Pilkada dilaksanakan pada masa transisi pemulihan pasca bencana dan situasi bencana pandemi covid 19 yang mengharuskan media kampanye menggunakan platform media sosial.

8.4 Saran

- (1) Penguatan sistem tata kelola bencana yang berdasarkan kebutuhan publik sehingga berdampak terhadap proses demokrasi yang ideal;

- (2) Penerapan strategi komunikasi publik yang transparan dan proaktif bagi pemerintah daerah yang mengalami masa pemulihan pasca bencana alam, untuk memberikan edukasi bagi warga mengenai batasan kewenangan fiskal dan regulasi pemerintah pusat dan daerah guna menghindari salah atributif politik.
- (3) Penguatan aspek-aspek pendukung dalam tata kelola penanganan bencana mulai dari aspek: regulasi, struktur kebijakan, kematangan tata kelola, struktur anggaran yang berbasis kebutuhan dan, sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga manajemen bencana menjadi komitmen politik pemerintah.